

Determinan Saldo Kas Akhir Tahun Pemerintah

Daerah Provinsi di Indonesia



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Annisa Prayusa Fitri

No. Mahasiswa : 18312220

Program Studi : Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

Determinan Saldo Kas Akhir Tahun Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana
Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas
Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Annisa Prayusa Fitri

No. Mahasiswa : 18312220

Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 Agustus 2022

Penulis



Annisa Prayusa Fitri

HALAMAN PENGESAHAN
Determinan Saldo Kas Akhir Tahun Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Annisa Prayusa Fitri
No. Mahasiswa : 18312220
Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 15 Agustus 2022
Dosen Pembimbing,



Siap diuji
15 Agustus 2022

(Arief Rahman, SIP., S.E., M.Com. Ph.D.)



**FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA**

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2022/2023, hari Kamis, tanggal 08 September 2022, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ANNISA PRAYUSA FITRI
NIM : 18312220
Judul Tugas Akhir : Determinan Saldo Kas Akhir Tahun Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia
Dosen Pembimbing : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A-
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Anggota Tim : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Yogyakarta, 14 September 2022

Ketua Program Studi Akuntansi,



Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS
NIK. 033120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Determinan Saldo Kas Akhir Tahun Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Disusun oleh : ANNISA PRAYUSA FITRI

Nomor Mahasiswa : 18312220

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 08 September 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Penguji : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Determinan Saldo Kas Akhir Tahun Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak perasaan suka dan duka yang menjadi kekurangan serta tantangan dan hambatan. Banyak kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyusunan skripsi ini yang sangat dibutuhkan penulis demi kesempurnaan penyusunannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang terkait.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat, ridho, serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis memiliki kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Arief Rahman, SIP., S.E., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan tambahan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Bambang Harianto, S.E. dan Ibu Baiq Nusukiyati, S.E. yang telah memberikan kasih sayang tak terhingga, selalu mendoakan dan memberikan dukungan hingga sampai saat ini, serta dukungan yang tiada henti untuk mendorong penulis perlahan menyelesaikan penelitian ini
7. Orang yang menjadi panutan dan sangat disegani Mami Baiq Miftahul Wasli yang selalu mengarahkan penulis ketika dalam keadaan tersulit, serta seluruh

keluarga dan Mba Ima yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis Hanifa Ramadhanti dan Baiq Arizkayana yang tak pernah lelah memberikan pandangan, motivasi, dan kekuatan untuk terus bangkit agar penulis dapat melalui kesulitan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga hingga sukses, pertemanan yang saling membangun ini akan terus berlanjut
9. Teman-teman lainnya Tassa dan Vania, serta Rudan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk peneliti sendiri, Annisa Prayusa Fitri, terimakasih sudah bertahan melawan rasa ketakutan dan kesulitan dalam pengerjaan skripsi ini, telah bertahan pada apa yang harus menjadi tanggung jawab, menjalankan proses dengan perlahan hingga mencapai tujuan.

Kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, maka

dari itu saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Annisa Prayusa Fitri', written in a cursive style.

Annisa Prayusa Fitri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III	42
METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Variabel Dependen	42
3.2 Variabel Independen.....	42
3.3 Data dan Sampel Penelitian	42

3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5	Teknik Analisis Data	44
BAB IV	48
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Analisis Statistik	50
4.2	Analisis Linear Berganda.....	53
4.3	Pembahasan	59
BAB V	66
KESIMPULAN DAN SARAN.....		66
5.1	KESIMPULAN.....	66
5.2	SARAN.....	67
5.3	KETERBATASAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Jumlah Data.....	48
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Mutikolinearitas.....	51
Tabel 4.4 Analisis Linear Berganda.....	54
Tabel 4.5 Koefisien Determinasi.....	56
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	41
Gambar 4.1 Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastis.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Saldo Kas Akhir	73
Lampiran 2 Data Serapan Anggaran	74
Lampiran 3 Data Saldo Bendahara Daerah	75
Lampiran 4 Data Saldo Kemandirian Daerah	76
Lampiran 5 Data Saldo Penyerapan Dana Perimbangan	77

ABSTRAK

Kas merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu sistem keuangan. Dalam keuangan daerah, kas terbagi menjadi saldo kas awal dan saldo kas akhir. Saldo kas akhir menjadi salah satu penentu kinerja pemerintah daerah, baik kinerja di tahun berjalan ataupun untuk periode berikutnya. Informasi saldo kas akhir tahun menjadi dasar pengambilan keputusan untuk tahun berikutnya dalam menyusun anggaran pemerintah daerah. Ketentuan besarnya saldo kas akhir tahun berpengaruh terhadap anggaran untuk tahun berikutnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya saldo kas akhir tahun pemerintah daerah Provinsi Se-Indonesia pada periode 2018-2020. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu Serapan Anggaran, Saldo Bendahara Daerah, Kemandirian Daerah dan Penyerapan Dana Perimbangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengambil populasi penelitian yaitu seluruh pemerintah daerah Provinsi Se-Indonesia pada periode 2018-2020. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Serapan Anggaran dan Kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Saldo Kas Akhir dan mendukung hipotesis peneliti dalam penelitian ini. Sedangkan variabel Saldo Bendahara Daerah dan Penyerapan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan dan menolak hipotesis peneliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Saldo Kas Akhir; Serapan Anggaran; Saldo Bendahara Daerah;
Kemandirian Daerah; Penyerapan Dana Perimbangan

ABSTRACT

Cash is one of the most important elements in a financial system. In regional finance, cash is divided into beginning cash balances and ending cash balances. The final cash balance is one of the determinants of local government performance, both performance in the current year or for the next period. The year-end cash balance information becomes the basis for making decisions for the following year in preparing local government budgets. The stipulation of the amount of cash balance at the end of the year affects the budget for the following year. This study aims to determine the factors that affect the amount of cash balances at the end of the year for regional governments throughout Indonesia in the 2018-2020 period. The independent variables in this research are Budget Absorption, Regional Treasures's Balance, Regional Independence, and Fiscal Funds Absorption. This research is a quantitative study by taking the research population, namely all regional governments of the Province of Indonesia in the 2018-2020 period. In sampling, this study uses purposive sampling method or sampling based on the criteria that have been determined in this study. The results obtained in this study indicate that Budget Absorption and Regional Independence have a significant influence on the Final Cash Balance and support the hypothesis of the researcher in this study. While the variables of the Regional Treasurer's Balance and Fiscal Funds Absorption have no significant effect and reject the researcher's hypothesis in this study.

*Keywords : Final Cash Balance; Budget Absorption; Regional Treasurer's Balance;
Regional Independence; Fiscal Funds Absorption*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi pengendapan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah semakin tinggi pada tahun 2022. Pemerintah daerah mengendapkan dana di bank untuk mendapatkan bunga bank yang akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perilaku ini dapat menyebabkan belanja Pemerintah Daerah itu sendiri menjadi rendah. Bunga bank yang menumpuk menyebabkan pengadaan konstruksi menjadi lambat dan adanya jenis belanja yang tidak tercatat dalam jurnal. Perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang matang diperlukan untuk meminimalisir kejadian seperti ini. Hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran daerah yang tidak tepat sasaran. Namun, Pemerintah Daerah kerap menganggap anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat rendah, sehingga permintaan tambahan anggaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Padahal Pemerintah Daerah itu sendiri memiliki banyak dana yang mengendap di bank, dan disisi lain pembangunan infrastruktur yang berjalan lambat. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani dalam rapat menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2022 menyatakan bahwa terdapat Rp 200 triliun dana mengendap di bank. Kondisi ini sangat disayangkan karena dana yang seharusnya dibelanjakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, hanya menjadi dana yang mengendap di bank dan tidak dibelanjakan. Peristiwa ini tentu menunjukkan

kinerja pemerintah daerah yang tidak dapat mengelola dana kas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah belum maksimal dalam pengelolaan kas.

Pada penelitian Indra (2021) menyimpan kas dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, serta memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan merupakan bentuk pengelolaan kas (Indra, 2017). Dalam penelitian Indra (2021) juga menjelaskan banyak motif yang muncul dalam suatu organisasi sehingga diharuskan adanya manajemen kas agar tidak berlebihan dan menimbulkan risiko. Oleh karena itu, setiap organisasi, termasuk pemerintah daerah memiliki saldo kas di tangan (*cash holdings*). Saldo kas akhir tahun merupakan saldo kas yang digunakan sebagai pembiayaan kegiatan dan kewajiban selama tahun berjalan (Abdullah & Muthia, 2017). Saldo kas akhir tahun menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola *cash holding* yang kemudian nanti akan menjadi saldo awal pada tahun berikutnya. Pemerintah daerah menerima dana yang kemudian diakumulasikan kelebihan kas yang sedikit. Kelebihan kas tersebut akan menambah *cash holding* yang kemudian dapat dibelanjakan oleh pemerintah daerah untuk biaya administrasi, gaji pejabat daerah, dan bonus (Abdullah & Muthia, 2017). *Cash holding* yang besar juga memberikan masalah keagenan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Kas sering disalahgunakan untuk membayar suap atau *grease money*, padahal kas hanya dapat digunakan sebagai pembayaran belanja sesuai dengan anggaran. Ketika saldo kas tinggi, maka akan timbul

ketidakefisienan aktivitas dan perencanaan yang kurang baik di pemerintah daerah, hal ini karena saldo kas akhir tahun merupakan saldo kas awal untuk periode berikutnya yang dapat digunakan langsung untuk belanja pemerintah daerah (Abdullah & Muthia, 2017)

Saldo kas akhir tahun dipengaruhi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nominal yang akan tercatat laporan arus kas. *Cash holding* yang dimiliki pemerintah akan digunakan untuk pembiayaan aktivitas operasional dan kewajiban jangka pendek pemerintah. Namun, dalam tahun berjalan akan ada pula penerimaan kas sehingga akan ada perhitungan kas di akhir tahun. Kas ini akan menjadi saldo kas akhir tahun yang digunakan untuk tahun berikutnya. Pemerintah daerah akan melakukan rencana dan anggaran dengan mempertimbangkan saldo kas tersebut juga. Sehingga untuk mengetahui apa saja pengaruh saldo kas akhir tahun, penelitian ini melakukan penelitian untuk mengetahui determinan saldo kas akhir tahun pemerintah daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam mengelola kas daerah sehingga saldo kas akhir tahun dapat digunakan secara optimal untuk tahun berikutnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Determinan Saldo Kas Akhir Tahun Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui determinan saldo kas akhir tahun pemerintah daerah. Adapun beberapa determinan yang ditetapkan adalah serapan anggaran, aktivitas bendahara, tingkat kemandirian daerah, dan penyerapan dana perimbangan. Maka berdasarkan latar belakang, penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah serapan anggaran berpengaruh terhadap saldo kas akhir tahun pemerintah daerah provinsi di Indonesia?
2. Apakah saldo bendahara daerah berpengaruh terhadap saldo kas akhir tahun pemerintah daerah provinsi di Indonesia?
3. Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap saldo kas akhir tahun pemerintah daerah provinsi di Indonesia?
4. Apakah penyerapan dana perimbangan berpengaruh terhadap saldo kas akhir tahun pemerintah daerah provinsi di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh serapan anggaran terhadap saldo kas akhir tahun pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh saldo bendahara daerah terhadap saldo kas akhir tahun pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

3. Untuk mengetahui kemandirian daerah terhadap saldo kas akhir tahun pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh penyerapan dana perimbangan saldo kas akhir tahun pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Dalam suatu organisasi, termasuk pemerintahan daerah, terdapat hubungan berbentuk vertikal, yakni antara atasan (sebagai prinsipal) dan bawahan (sebagai agen). Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut populer dikenal sebagai teori keagenan, salah satu teori keagenan yang sering dijadikan landasan yaitu teori agensi menurut Jensen dan Meckling. Penjelasan teori agensi menurut (Jensen & Meckling, 1976) menggambarkan hubungan kontrak antara satu atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam hubungan keagenan terdiri dari dua pihak dengan kesepakatan atau kontrak dalam bentuk pemberian kewenangan atau kekuasaan (prinsipal) dan penerima kewenangan (agen). (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan mengenai konflik kepentingan (*the agent will not always act in the best interests of the principal*) memicu terjadinya biaya agensi.

Teori keagenan dijadikan sebagai usaha dalam menjawab masalah keagenan yang terjadi dalam pihak-pihak yang saling bekerja sama ketika mereka memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan ini menggambarkan tentang adanya hubungan keagenan, dimana

suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*), yang melakukan pekerjaan. Adapun beberapa asumsi-asumsi yang dijelaskan dijadikan landasan dari suatu teori agensi (Jensen & Meckling, 1976). Asumsi-asumsi tersebut yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia cenderung menggambarkan bahwa manusia mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian yaitu konflik antar anggota organisasi, kriteria efektivitas dengan efisiensi dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi menjelaskan bahwa informasi dapat diperjualbelikan sebagai barang komoditi.

Dalam lembaga pemerintahan, kedudukan legislatif atau parlemen (DPRD) sebagai agen menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan dan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan public, salah satunya adalah pembuatan keputusan anggaran pemerintahan dalam penggunaan kas daerah.

Dilihat dari asumsi teori keagenan, maka *principal* akan meningkatkan kesejahteraan diri dan golongannya (*self interest*) karena memiliki kekuasaan (*discretionary power*), sedangkan penguasaan informasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah karena mereka yang terjun langsung dalam pekerjaan teknis. Dalam aturan formal diatur bahwa entitas pemerintahan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang,

dan tanggungjawab setiap partisipan. Dalam pemerintahan terdapat ikatan formal yang menunjukkan adanya kontrak dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Hal ini memberikan justifikasi bahwa terdapat hubungan keagenan dalam organisasi pemerintahan di Indonesia.

Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diberikan badan eksekutif berisi muatan yang mengutamakan kepentingan eksekutif. Dari segi keuangan dan non-keuangan, eksekutif akan mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agensinya. Selain itu, anggaran dapat juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi *self-interest* mereka. Pada akhirnya dalam penyusunan rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif menggunakan informasi yang dimiliki oleh eksekutif

Dalam penyusunan suatu anggaran, pemerintah bersama dewan membuat kebijakan berdasarkan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam menentukan anggaran belanja menggunakan saldo kas, dewan membutuhkan informasi mengenai kas pada akhir tahun anggaran yang kemudian akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya dan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dalam menyusun anggaran untuk tahun tahun berikutnya.

2.1.2 Kas Pemerintah Daerah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dapat setiap saat digunakan membiayai kegiatan pemerintah. Kas merupakan asset pemerintah yang memiliki sifat sangat likuid dan aktif. Sifat likuid ini menunjukkan bahwa kas sangat lancar dibuktikan dengan cepat diubah menjadi asset lain, sebagai alat pembayaran, dan pemenuhan kewajiban pemerintah (Agus & Madya, 2015). Aset pemerintah daerah yang paling penting adalah kas yang digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional dan fungsi pelayanan publik pemerintah daerah (Abdullah & Muthia, 2017). Dalam penyusunan neraca awal seluruh UP yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal masuk ke dalam kas, begitupula dengan kuitansi pembelian (Ambarwati, 2020). Setara kas adalah saldo simpanan daerah yang sangat likuid dan dapat diubah menjadi kas dengan jatuh tempo yang dekat dan memiliki nilai pasar yang tidak sensitif terhadap suku bunga (Ambarwati, 2020).

Secara garis besar, transaksi pemerintah berhubungan dengan arus kas, yaitu arus penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dalam pemerintah daerah, kas dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Kas di Kas Daerah
2. Kas di Bendahara Penerimaan
3. Kas di Bendahara Pengeluaran
4. Kas di Luar Pengelolaan BUD

Kas di kas daerah berada di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan disimpan dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (Agus & Madya, 2015). RKUD ini berisi penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah. Setiap awal tahun anggaran kepala pemerintahan daerah akan menunjuk Bendahara Penerimaan dalam proses pelaksanaan anggaran pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Saldo kas pada bendahara penerimaan berisi kas tunai dan kas di rekening penerimaan yang akan terus bertambah jika ada uangan masuk dari penerimaan PAD, serta akan berkurang jika adanya uang keluar dari kegiatan transfer penerimaan pendapatan ke RKUD. Penyetoran penerimaan pendapatan ke rekening RKUD dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah dan jika terdapat saldo yang masih ada di bendahara penerimaan, maka pada neraca akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas yang ketiga berada di rekening bendahara pengeluaran. Aktivitas kas pada bendahara pengeluaran yaitu penggunaan uang persediaan setiap SKPD yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Sama halnya dengan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran akan diangkat setiap awal tahun anggaran. Selain pengeluaran uang persediaan, saldo di bendahara pengeluaran juga terdapat tambahan persediaan dana LS. Kas di bendahara pengeluaran berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara/Daerah per tanggal neraca yang terdiri dari saldo rekening bendahara pengeluaran, uang

logam, uang kertas, dan lain-lain kas (pada pemerintah pusat termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) (Ambarwati, 2020).

Sedangkan kas di luar pengelolaan BUD seperti saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan dan kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD berbeda dengan instansi pemerintah lainnya karena BLU dikelola secara otonom. BLUD juga dapat membiayai operasional pemerintah secara langsung. Hal ini dikarenakan aset BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Dalam saldo kas di BLUD terdiri dari kas tunai BLUD, kas di bank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD, uang muka pasien RSUD/BLUD, dan uang titipan BLUD.

Kas pemerintah daerah digunakan untuk belanja operasional pemerintah daerah seperti belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Uang Persediaan merupakan jumlah yang telah diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional SKPD. Pada akhir tahun anggaran sisa akan terdapat ketentuan mengenai sisa UP yang belum digunakan harus disetorkan kembali ke RKUD. Jika hingga pada tanggal pencatatan kas masih berada di saldo bendahara pengeluaran maka akan di catat sebagai kas di bendahara pengeluaran, begitupula dengan belanja yang masih dalam berupa kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan (Agus & Madya, 2015).

Selain transaksi belanja, ada pula transaksi pembiayaan yang mencakup pemberian pinjaman, pelunasan pokok utang, investasi, dan pembentukan dana

cadangan. Selain itu, ada pula transaksi transfer yaitu pemindahan antarbank untuk maksud pembiayaan dan pemindahan dana antar bank sebuah entitas. Pada akhir pelaporan kas pemerintah daerah, semua pengeluaran ini akan menjadi pengurang saldo kas yang ada di tangan (*cash holding*) kemudian akan didapatkan saldo kas akhir tahun untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca, kas akhir tahun pemerintah daerah akan disajikan dan rincian lebih lanjut akan dilaporkan dalam laporan arus kas (Abdullah & Muthia, 2017). Saldo kas akhir tahun merupakan saldo kas yang digunakan sebagai pembiayaan kegiatan dan kewajiban selama tahun berjalan (Abdullah & Muthia, 2017). Saldo kas akhir tahun menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola *cash holding* yang kemudian nanti akan menjadi saldo awal pada tahun berikutnya. *Cash holding* yang besar juga memberikan masalah keagenan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Kas sering disalahgunakan untuk membayar suap atau *grease money*, padahal kas hanya dapat digunakan sebagai pembayaran belanja sesuai dengan anggaran. Ketika saldo kas tinggi, maka akan timbul ketidakefisienan aktivitas dan perencanaan yang kurang baik di pemerintah daerah, hal ini karena saldo kas akhir tahun merupakan saldo kas awal untuk periode berikutnya yang dapat digunakan langsung untuk belanja pemerintah daerah (Abdullah & Muthia, 2017).

2.1.3 Serapan Anggaran Pemerintah Daerah

Serapan anggaran menunjukkan anggaran belanja yang dapat direalisasi dalam satu periode tahun anggaran, besaran serapan anggaran berbanding terbalik dengan saldo kas (Abdullah & Muthia, 2017). Jika suatu anggaran diserap berarti ada anggaran belanja yang telah direalisasi sehingga akan ada kas yang dikeluarkan dalam realisasi belanja tersebut. Sehingga jika pemerintah dapat melakukan realisasi belanja dalam jumlah besar, berarti sisa kas dalam saldo pemerintah daerah akan kecil dan hal tersebut menunjukkan kinerja pemerintah yang bagus. Hal ini dikarenakan belanja yang dilakukan pemerintah akan menunjukkan bahwa pembangunan dan pelayanan yang dilakukan telah optimal sesuai dengan yang dianggarkan (Ruhmaini et al., 2019). Varian anggaran ditunjukkan oleh adanya selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang terealisasi, sehingga semakin kecil varian anggaran (*budget variances*), maka semakin besar serapan anggaran serta menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan (Ruhmaini et al., 2019). Perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran. Daya serap anggaran yang tinggi berarti sedikitnya sisa anggaran (yang merupakan implikasi dari terjadinya varian anggaran) pada akhir tahun (Ruhmaini et al., 2019). Hasil dari penelitian Ruhmaini dan kawan (2019) menunjukkan serapan anggaran belanja masing – masing cenderung fluktuatif.

Untuk menciptakan anggaran yang efektif dan efisien, pemerintah daerah melakukan penyusunan prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran

yang efektif dan efisien juga, salah satu untuk mengoptimalkan penyerapan adalah dengan perencanaan penarikan dana (Zakiati, 2016). Serapan anggaran berarti pemerintah daerah telah melaksanakan anggaran, namun pada kenyataannya pencairan anggaran cenderung rendah dan mengalami penumpukan pada akhir tahun sehingga mencerminkan pengelolaan keuangan pemerintah yang kurang baik (Zakiati, 2016). Sehingga untuk memenuhi kebutuhan biaya dari aktivitas operasional, pemerintah daerah cenderung akan menggunakan kas yang memiliki bersifat lancar, agar penganggaran dapat terlaksana.

Pertanggungjawaban atas serapan anggaran menjadi prioritas utama, meskipun serapan anggaran bukan merupakan faktor utama dalam pengukuran kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban serapan anggaran dapat dinilai dalam laporan keuangan Pemda. Serapan anggaran akan semakin besar jika pemerintah daerah memiliki aktivitas dan program yang banyak dalam merealisasikan anggarannya. Ketika serapan anggaran mendekati 100%, BPK akan menilai adanya kemunculan kecurangan yang mungkin akan terjadi (Nusa & Muslihah, 2021).

Hingga sekarang pemerintah belum menentukan secara baku presentase serapan anggaran APBD suatu daerah tergolong rendah. Dalam pelaksanaan anggaran, serapan anggaran sangat menentukan besarnya saldo kas akhir tahun, hal ini dikarenakan penggunaan kas dalam penganggaran untuk membayar belanja selama tahun anggaran sehingga saldo kas pada akhir tahun akan

berkurang (Abdullah & Muthia, 2017). Serapan anggaran terdiri dari alokasi murni periode anggaran berjalan dan sisa atau lanjutan pekerjaan yang telah dialokasikan sebelumnya. Namun, pada akhir periode anggaran sering terjadi penarikan dana sari rekening kas daerah di bank secara besar-besaran dan pembayaran semua sisa kewajiban (Abdullah & Muthia, 2017).

Serapan anggaran memiliki pengaruh yang cukup penting dalam penggunaan kas pemerintah daerah, sehingga besarnya serapan anggaran dapat mempengaruhi jumlah saldo kas akhir tahun pemerintah daerah (Ruhmaini et al., 2019). Serapan anggaran pada kenyataannya pencairan anggaran cenderung rendah dan mengalami penumpukan pada akhir tahun sehingga mencerminkan pengelolaan keuangan pemerintah yang kurang baik (Zakiati, 2016). Sehingga untuk memenuhi kebutuhan biaya dari aktivitas operasional, pemerintah daerah cenderung akan menggunakan kas yang memiliki bersifat lancar, agar penganggaran dapat terlaksana.

2.1.4 Bendahara Pemerintah Daerah

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengertian Bendahara adalah:

“Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah”. (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 14).

Bendahara daerah diatur dalam Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya. Dalam Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa bendahara terdiri dari Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setiap awal tahun anggaran, bendahara-bendahara tersebut akan dipilih oleh gubernur untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD di pemerintah daerah (Agus & Madya, 2015).

Selain bendahara yang dipilih pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah daerah memiliki Bendahara Umum Daerah (BUD). BUD ini merupakan pejabat yang bertanggungjawab untuk mengelola uang daerah meliputi rupiah dan valuta asing. BUD merupakan pejabat dengan posisi Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). BUD mengelola kas daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). RKUD berfungsi sebagai rekening yang berisi seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah (Agus & Madya, 2015).

Bendahara pengeluaran memiliki tanggung jawab untuk mengelola saldo kas dari sisa Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan Kembali ke kas negara per tanggal neraca (Ambarwati, 2020). Dalam penelitian Ambarwati (2020)

mengatakan adanya potensi saldo menganggur pada pengelolaan kas di bendahara pengeluaran, hal ini didukung oleh tidak akuratnya informasi terkait jumlah kas yang dikuasai bendahara pengeluaran sehingga sering terjadi adanya kesalahan pengambilan kebijakan saldo kas (Agus & Madya, 2015). Aktivitas pemerintah daerah dalam penggunaan kas diatur oleh bendahara daerah sehingga jumlah *cash holding* yang dimiliki pemerintah daerah dalam laporan keuangan berasal dari saldo bendahara daerah. Dalam mengelola dan bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditunjuk pada suatu satuan kerja. BPP wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran (Harjowiryo, 2020).

2.1.5 Kemandirian Pemerintah Daerah

Tingkat kemandirian merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan diri sendiri yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pemerintah pusat dan pinjaman (Orocomna et al., 2015). Dalam meningkatkan kemandirian, daerah memerlukan usaha-usaha dalam mengoptimalkan kemampuan keuangan sendiri dengan meningkatkan penerimaan PAD (Saputra & Fernando, 2017). Kinerja keuangan daerah baik jika pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai

pengeluaran daerahnya, dimana PAD merupakan indikator pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah (Saputra & Fernando, 2017).

Adapun sumber-sumber PAD yang berkontribusi dalam meningkatkan PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD. Semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah, artinya tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah (Saputra & Fernando, 2017). Dalam penelitian Saputra & Fernando (2017) mengatakan bahwa pola dari hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tersebut dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Adapun hubungan situasional yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Saputra & Fernando, 2017), yaitu :

- a. Pola hubungan instruktif, dimana pemerintah pusat lebih dominan dari kemandirian pemerintah daerah.
- b. Pola hubungan konsultatif, dimana partisipasi pemerintah pusat mulai berkurang karena pemerintah daerah sudah mulai mampu melaksanakan otonomi daerah
- c. Pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah pusat sudah mulai berkurang berperan dalam kemandirian pemerintah daerah karena pemerintah daerah semakin mampu melaksanakan otonomi daerah

- d. Pola hubungan delegatif, dimana tidak ada peranan pemerintah pusat karena pemerintah daerah sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah.

Dalam penelitian (Akbar et al., 2016) menunjukkan bagaimana peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam kenaikan PAD dengan pengelolaan kas pemerintah daerah dalam bentuk deposito. Dalam penelitiannya bahwa pengelolaan kas pemerintah daerah dalam bentuk deposito dikatakan sudah memadai jika adanya unit pengelola, regulasi penempatan uang pada bank umum dan prosedur pengelolaannya, kebijakan penempatan deposito, dan perencanaan kas yang disusun telah disusun secara periodic dan penetapan saldo kas minimal (Akbar et al., 2016). Sehingga efektivitas pengelolaan kas daerah dalam bentuk deposito dapat meningkatkan PAD.

2.1.6 Dana Perimbangan (*Fiscal Decentralization*)

Salah satu bentuk desentralisasi yang dijalankan dan diterapkan di Indonesia adalah desentralisasi fiskal dimana memberi wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengolah sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan hal untuk menerima dana desentralisasi dari pemerintah yang lebih tinggi, untuk daerah provinsi yaitu dana desentralisasi dari pemerintah pusat yang disebut dana perimbangan (Ginting & Hamzah, 2019). Dana perimbangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah sebagai bentuk pendanaan dalam realisasi kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Dana perimbangan dapat juga disebut sejumlah uang melalui APBN yang diterima oleh pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat sebagai pendanaan daerah dalam membiayai kegiatan ekonomi (Saleh, 2020). Dalam Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bahwa dana perimbangan dibagi menjadi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Penyerapan dana merupakan realisasi anggaran yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan. Dana perimbangan salah satu bentuk penyerapan APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah dan akan diserap oleh pemerintah daerah dengan merealisasikannya dalam mendanai pembiayaan-pembiayaan kegiatan daerah yang telah dimuat dalam APBD (Zaenudinsyah, 2016). Dalam penelitian (Inayari & Setiawan, 2017) menunjukkan bahwa dana transfer pemerintah pusat terus meningkat setiap tahun dan penyerapan dana tersebut oleh pemerintah daerah pun semakin meningkat. Menurutnya juga *flypaper effect* terjadi dalam pemerintah daerah yaitu kecenderungan pemerintah daerah dalam penyerapan dana transfer dibandingkan menggunakan pendapatan asli daerah (Inayari & Setiawan, 2017). Stimulasi atas belanja yang ditimbulkan ketika pendapatan daerah

cenderung berasal dari dana transfer akan berbeda dengan stimulasi dari pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, maka kondisi ini akan menyebabkan *flypaper effect*. Besaran dana transfer ini pun akan masuk ke dalam saldo kas pemerintah daerah. Sehingga besaran yang didapat dan diserap akan terakumulasi dalam saldo kas pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	(Abdullah & Muthia, 2017)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo kas akhir tahun pemerintah daerah kabupaten/kota <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah 2. Perubahan Anggaran 3. Saldo Kas Tahun Lalu 4. Serapan Anggaran 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Pemda dan Saldo Kas Tahun Lalu berpengaruh positif, Serapan Anggaran berpengaruh negatif, dan Perubahan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Saldo Kas Akhir Tahun pada 23 kabupaten/kotadi Aceh untuk tahun anggaran 2013-2015.</p>
2	(Akbar et al., 2016)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPKD 2. Kuasa BUD 	<p>Pertumbuhan PAD (15.71%) berbanding lurus dengan pertumbuhan Pendapatan Bunga Deposito (55,96%). Kontribusi Pendapatan Bunga Deposito terbesar</p>

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
		3. Bendaharawan penerimaan PPKD	kedua pada tahun 2014 dan 2015 terhadap PAD.
3	(Ambarwati, 2020)	<p>Variabel Dependen:</p> <p>1. Pelaporan Saldo Kas</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>1. Soft System Methodology (SSM)</p>	<p>Permasalahan dalam pelaporan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidapatuhan satuan kerja pengelola kas dalam proses akuntansi penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran. 2. KPPN kurang mengkoordinasikan pemberian UP/TUP dan pencatatan mutasinya 3. Lemahnya koordinasi mengenai penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran antar direktorat pada

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
			<p>Direktorat Jenderal Perbendaharaan</p> <p>4. Pemberian sanksi tidak berjalan dengan maksimal karena KPPN yang lemah sebagai Kuasa BUN.</p> <p>5. Sanksi yang diberikan kurang tegas dan kurang efektif.</p> <p>6. Adanya potensi kas menganggur yang besar sebagai karena kurang baiknya satker dalam merencanakan dan mengelola UP/TUP</p>
4	(Harjowiryo, 2020)	<p>Variabel Dependen:</p> <p>1. Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah</p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kemudahan Aplikasi Perpajakan, Efektivitas Administrasi Perpajakan</p>

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sikap terhadap kewajiban perpajakan 3. Kualitas pelayanan perpajakan 4. Kemudahan aplikasi perpajakan 5. Efektivitas administrasi perpajakan 6. Sertifikasi bendahara 	<p>dan Sertifikasi Bendahara memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah.</p>
5	(Indra, 2017)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo kas optimal BLU <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aliran kas masuk dan keluar 2. Jumlah saldo, tenor dan jenis simpanan di bank 	<p>Saldo kas riil RS Kariadi tahun 2016 jauh lebih tinggi dibandingkan saldo kas optimal model Miller-Orr. RS Kariadi menerapkan cash forecasting, tetapi saldo kas selain deposito masih jauh lebih tinggi dari proyeksi kebutuhan pengeluaran atau kebutuhan penggunaan kas.</p>

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
		3. Tingkat bunga simpanan dan deposito 4. Besaran pinalti deposito	
6	(Nusa & Muslihah, 2021)	<p>Variabel Dependen:</p> 1. Hasil Audit LKPD <p>Variabel Independen:</p> 1. Serapan anggaran 2. Kepemimpinan etis 3. Tindak lanjut temuan BPK 4. Keefektifan audit internal	<ul style="list-style-type: none"> - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh negatif terhadap hasil opini wajar atas audit laporan keuangan pemerintah daerah, proporsi anggaran publik berpengaruh negatif terhadap opini wajar yang diterbitkan auditor BPK. - Kepemimpinan etis memiliki pengaruh positif terhadap hasil opini perioda berikutnya atas audit laporan keuangan

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
			<p>pemerintah daerah di wilayah DIY dan Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keefektifan internal audit berpengaruh positif hasil opini wajar atas audit laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. - Tindak lanjut hasil temuan BPK berpengaruh negatif hasil opini wajar atas audit laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah DIY dan Jawa Tengah.
7	(Orocomna et al., 2015)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian daerah <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak 2. Retribusi 	<p>Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Teluk Bintuni sangat kurang ditunjukkan dengan ketergantungan yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan, Pendapatan Asli</p>

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
		3. Tingkat Ekonomi	Daerah belum dapat diandalkan untuk otonomi daerah, karena pajak / retribusi yang ada di daerah relatif rendah dan pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah masih kurang.
8	(Ruhmaini et al., 2019)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serapan anggaran <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis belanja daerah 2. Fungsi belanja daerah 3. Organisasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Serapan anggaran Kabupaten Aceh Tengah (2012-2015) masih menunjukkan angka dibawah 95%. - Serapan anggaran belanja tertinggi adalah serapan anggaran berdasarkan organisasi yaitu sebesar 94,44%, SKPK yang memiliki serapan anggaran paling tinggi adalah Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemberdayaan

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
			<p>Masyarakat Pemerintahan Kampung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serapan anggaran berdasarkan fungsi belanja sebesar jenis belanja 93,32% - Serapan belanja berdasarkan jenis belanja sebesar 87,03%.
9	(Saputra & Fernando, 2017)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian keuangan daerah <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber-sumber PAD 	<p>Sumber-sumber PAD yang sangat berkontribusi terhadap total PAD tersebut berasal dari Pajak Daerah Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah masih sangat kecil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 50%, sehingga kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tergolong rendah berdasarkan rasio keuangan.</p>

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
10	(Zakiati, 2016)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serapan anggaran belanja <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target 2. Realisasi pertriwulan 3. Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan 4. Ketepatan waktu pengesahan APBK 5. Penambahan jumlah alokasi belanja 	<p>Serapan anggaran belanja pada SKPK Pemerintah Kota Sabang cenderung rendah pada awal tahun dari target yang ditetapkan sehingga mengalami penumpukan pada akhir tahun anggaran. Hal tersebut karena tidak tepatnya waktu pada penetapan APBK murni dan APBK perubahan, sehingga menyebabkan keterlambatan program/kegiatan. Selain itu, bertambahnya jumlah anggaran belanja pada SKPK sebagai akibat dari penambahan alokasi belanja pada saat perubahan anggaran sehingga menjadi kendala bagi SKPK dalam melakukan realisasi anggarannya.</p>
11	(Ginting & Hamzah, 2019)	<p>Variabel Dependen:</p>	<p>- Variabel dana perimbangan tidak memiliki pengaruh</p>

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
		<p>1. Kemandirian keuangan daerah</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>2. Sumber-sumber PAD</p>	<p>signifikan pada kabupaten/kota terhadap kemandirian keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang lebih 91,3% kabupaten/kota memiliki dana perimbangan relative rendah dan kemandirian yang rendah - Banyak kota yang belum dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri
12	(Zaenudinsyah, 2016)	<p>Variabel Dependen:</p> <p>1. Kemandirian keuangan daerah</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>3. Sumber-sumber PAD</p>	<p>1. Administrasi perbendaharaan menjelaskan variasi seluruh item sebesar 27,592%</p> <p>2. Pelaksanaan pengadaan menjelaskan variasi seluruh item sebesar 9,693%</p>

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
			<p>3. Perencanaan menjelaskan variasi seluruh item sebesar 7,33%</p> <p>4. Persyaratan teknis pendukung menjelaskan variasi seluruh item sebesar 6,325%</p> <p>5. Jadwal pengadaan menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,127%</p> <p>6. SDM menjelaskan variasi seluruh item sebesar 4,643</p> <p>7. Kompetensi menjelaskan variasi seluruh item sebesar 4,069%</p> <p>8. Mutasi Pejabat menjelaskan variasi seluruh item sebesar 3,544%</p>

No	(Peneliti, Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
13	(Saleh, 2020)	<p>Variabel Dependen:</p> <p>1. Kemandirian keuangan daerah</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>4. Sumber-sumber PAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah - Adanya indikasi terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia - <i>Flypaper effect</i> terjadi akibat serpon belanja daerah > DAU namun < PAD
14	(Inayari & Setiawan, 2017)	<p>Variabel Dependen:</p> <p>1. Kemandirian keuangan daerah</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>5. Sumber-sumber PAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor - Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor

2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Serapan Anggaran terhadap Saldo Kas Akhir Tahun

Sesuai dengan pengertian oleh Abdullah & Muthia (2017) bahwa serapan anggaran berbanding terbalik dengan saldo kas dan suatu bentuk realisasi anggaran belanja dalam suatu periode tahun berjalan. Dalam pencairan anggaran pemerintah daerah cenderung rendah dan mengalami penumpukan pada akhir tahun dan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang kurang baik (Zakiati, 2016). Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan bahwa legislatif daerah yang merupakan agen menggunakan informasi kas akhir daerah ini sebagai pertimbangan dalam menyusun anggaran untuk tahun berikutnya. Informasi mengenai seberapa besar serapan anggaran yang mempengaruhi dan menentukan kas akhir tahun pemerintah daerah menjadi pertimbangan penting bagi DPRD sebagai legislatif pemerintah daerah dalam menentukan anggaran kas tahun berikutnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran dengan merealisasikan belanja yang telah dianggarkan dapat memberikan pengaruh terhadap saldo kas akhir tahun. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan biaya dari aktivitas operasional, pemerintah daerah cenderung akan menggunakan kas yang memiliki bersifat lancar, agar penganggaran dapat terlaksana. Dalam penelitian (Abdullah & Muthia, 2017) menjelaskan hubungan antara besarnya porsi anggaran yang

terserap berbanding lurus dengan besarnya porsi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, semakin besar kemungkinan tercapainya keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelayanan publik. Menurut penelitian tersebut saldo kas pada akhir tahun tidak seharusnya besar. Hal ini dikarenakan risiko berupa kehilangan atau masalah keagenan disebabkan oleh *idle cash* yang besar. Adanya penyesuaian anggaran yang memperburuk kinerja (varian anggaran belanja semakin besar) menjadi masalah keagenan dalam serapan anggaran yang rendah dan menyebabkan penumpukan pada akhir tahun. Hal ini juga didukung dalam penelitian (Ruhmaini et al., 2019) dan penelitian (Zakiati, 2016) yang menunjukkan adanya penumpukan pada kas akhir tahun pemerintah daerah. Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu dinyatakan bahwa hubungan antara serapan anggaran dan kas akhir tahun pemerintah daerah adalah berbanding terbalik, yang artinya semakin besar penyerapan anggaran maka penumpukan kas pada akhir tahun akan semakin kecil. Berdasarkan pemahaman ini, maka hipotesis pertama untuk penelitian ini seperti berikut:

H₁: Serapan anggaran berpengaruh negatif terhadap saldo kas akhir tahun.

2.3.2 Pengaruh Bendahara Daerah terhadap Saldo Kas Akhir Tahun

Bendahara daerah sebagai pengelola dan bertanggung jawab atas keluar dan masuknya kas dalam saldo rekening yang dikelola memiliki peran penting dalam mengatur jumlah saldo kas akhir tahun. Bendahara daerah sebagai bagian

dari pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur arus kas yang ada di pemerintah daerah. Bendahara daerah memiliki kewenangan dalam keluar dan masuknya kas daerah. Dalam mengatur pengeluaran kas daerah, bendahara pengeluaran memiliki tanggung jawab dalam mengatur seberapa besar pengeluaran kas daerah yang berada di dalam saldo bendahara pengeluaran. Pengeluaran kas yang dilakukan bendahara daerah telah di atur dalam anggaran dan dilaksanakan sesuai anggaran. Namun, masalah keagenan yang timbul dalam bendahara pengeluaran yaitu penentuan anggaran pengeluaran pemerintah daerah yang cenderung kecil menyebabkan adanya saldo kas yang tidak keluar dari saldo bendahara pengeluaran. Dalam penelitian Ambarwati (2020) mengatakan adanya potensi saldo menganggur pada pengelolaan kas di bendahara pengeluaran, hal ini didukung oleh tidak akuratnya informasi terkait jumlah kas yang dikuasai bendahara pengeluaran sehingga sering terjadi adanya kesalahan pengambilan kebijakan saldo kas (Ambarwati, 2020). Aktivitas pemerintah daerah dalam penggunaan kas diatur oleh bendahara daerah sehingga jumlah *cash holding* yang dimiliki pemerintah daerah dalam laporan keuangan berasal dari saldo bendahara daerah. Dalam penelitian (Harjowiryo, 2020) menjelaskan bahwa perlunya kepatuhan bendahara daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengatur keluar masuknya saldo kas dalam bendahara tersebut. Kepatuhan dan kemampuan bendahara pengeluaran dapat diketahui dengan jumlah saldo dalam bendahara pengeluaran tersebut. Kemampuan bendahara pengeluaran dalam

memaksimalkan informasi terkait dengan jumlah pengeluaran kas pemerintah daerah ditunjukkan dengan saldo bendahara pengeluaran. Jumlah saldo bendahara pengeluaran ini akan dicantumkan dalam pelaporan kas daerah sehingga mempengaruhi besaran saldo kas pada akhir tahun. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, bendahara pengeluaran daerah berpengaruh terhadap saldo kas akhir tahun. Semakin tinggi kemampuan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan kas daerah, maka kas untuk anggaran pengeluaran juga akan optimal, sehingga kas yang menganggur akan cenderung lebih rendah. Dan sebaliknya, jika bendahara pengeluaran tidak mengoptimalkan saldo untuk anggaran pengeluaran, maka akan terjadi kenaikan *cash holding* pada akhir tahun. Oleh karena itu, hipotesis kedua untuk penelitian ini, yaitu:

H₂: Bendahara pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap saldo kas akhir tahun

2.3.3 Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Saldo Kas Akhir Tahun

Kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan diri sendiri diukur dengan rasio PAD terhadap jumlah dari pemerintah pusat dan pinjaman (Orocomna et al., 2015). Kemandirian daerah menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bergantung terhadap pemerintah pusat, sehingga beberapa saldo kas merupakan sisa dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam penelitian (Akbar et al., 2016) menunjukkan bagaimana peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam besarnya saldo PAD lain-lain yang sah

dengan pengelolaan kas pemerintah daerah. Badan legislatif daerah sebagai agen yang memiliki wewenang dalam penyusunan rencana kas dan penetapan saldo minimal akan menggunakan informasi seberapa besar kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Kemampuan ini dapat dilihat dengan seberapa besar kemandirian dari daerah tersebut. Dalam penelitian sebelumnya bahwa pengelolaan kas pemerintah daerah dikatakan sudah memadai jika adanya perencanaan kas yang disusun telah disusun secara periodik dan penetapan saldo kas minimal (Akbar et al., 2016). Sehingga aktivitas tersebut dapat masuk ke dalam aktivitas operasional. Aktivitas operasional yang memengaruhi saldo kas salah satunya adalah jumlah PAD lain-lain yang sah. Besarnya PAD mewakili sebagaimana besar kemandirian suatu daerah. Pemasukan PAD yang besar akan berpengaruh terhadap kas daerah melalui besarnya PAD lain-lain yang sah sebagai salah satu bentuk aktivitas operasional daerah. Sehingga, besarnya kemandirian daerah dilihat dari jumlah banyaknya PAD lain-lain yang sah yang kemudian memiliki pengaruh terhadap jumlah saldo kas akhir tahun. Dengan begitu, dapat diambil hipotesis ketiga untuk penelitian ini seperti berikut:

H₃: Kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap saldo kas akhir tahun

2.3.4 Pengaruh Penyerapan Dana Perimbangan terhadap Saldo Kas Akhir Tahun

Dana desentralisasi fiskal merupakan dana diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengolah sumber pendapatan daerah oleh pemerintah pusat (Ginting & Hamzah, 2019). Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa dana transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah sebagai bentuk pendanaan dalam realisasi kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Dana perimbangan merupakan dana APBN yang dibagi menjadi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan salah satu bentuk penyerapan APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah dan akan diserap oleh pemerintah daerah dengan merealisasikannya dalam mendanai pembiayaan-pembiayaan kegiatan daerah yang telah dimuat dalam APBD (Zaenudinsyah, 2016). Dalam penelitian (Inayari & Setiawan, 2017) terjadi *flypaper effect* dalam pemerintah daerah yaitu kecenderungan pemerintah daerah dalam penyerapan dana transfer dibandingkan menggunakan pendapatan asli daerah. Sehingga untuk memaksimalkan dengan efektif antara penyerapan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Dalam melakukan penyerapan dana transfer, sangat didukung oleh anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri. Hal tersebut dikarenakan dana transfer masuk dalam saldo kas pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah menyerap dana transfer terlalu kecil, kecenderungan saldo kas akan meningkat. Sehingga ketika pada periode selanjutnya, dana transfer akan terakumulasi dan

menyebabkan penambahan saldo kas pemerintah daerah. sebaliknya ketika penyerapan dana perimbangan besar, maka sisa yang masuk ke dalam saldo kas rendah. Peristiwa inilah yang menjadi pertimbangan badan legislatif sebagai agen dalam menyusun anggaran pemerintah daerah. Sehingga informasi mengenai besaran dana transfer yang masuk ke dalam saldo kas pemerintah daerah menjadi menjadi informasi dalam pembuatan anggaran. Dengan begitu, dapat diambil hipotesis keempat untuk penelitian ini seperti berikut:

H₄ : Penyerapan dana perimbangan daerah berpengaruh negatif terhadap saldo kas akhir tahun

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu saldo kas akhir tahun yang pengukurannya menggunakan nominal saldo kas akhir tahun pada laporan keuangan daerah provinsi.

3.2 Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan variabel independen sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran, alat ukur rasio realisasi belanja
2. Saldo Bendahara Daerah, alat ukur rasio bendahara pengeluaran
3. Kemandirian Daerah, alat ukur rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Penyerapan dana perimbangan, alat ukur rasio dana transfer/perimbangan

3.3 Data dan Sampel Penelitian

Data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan daerah provinsi seluruh Indonesia. Kriteria laporan keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang transparan atau tersedia untuk publik, lengkap, dan telah diaudit. Provinsi yang memenuhi kriteria sebanyak 14 provinsi, dengan rentang periode laporan keuangan 2018 sampai dengan 2020. Laporan keuangan setiap provinsi akan

dinilai sesuai dengan teknik pengumpulan data, kemudian ditemukan data hasil observasi yang dibutuhkan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan diperoleh dari pihak lain atau melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan daerah provinsi 2018-2020 pada setiap provinsi di Indonesia yang menjadi sample. Sehingga teknik pengumpulan data sample yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan data yang akan menjadi sampel dengan menentukan kriteria-kriteria yang ditentukan penulis dan mengambil data yang paling sesuai. Adapun kriteria data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Laporan keuangan provinsi 2018-2020
2. Laporan keuangan provinsi yang sudah diaudit
3. Laporan keuangan provinsi yang lengkap dan sesuai dengan standar pelaporan
4. Laporan keuangan provinsi yang tertera pada website resmi (transparan)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik (Uji Asumsi Klasik)

Uji asumsi klasik merupakan analisis statistik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastis. Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen dan variabel dependen dalam suatu model persamaan regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel independen dan variabel dependen dalam suatu model persamaan regresi. Sedangkan uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada varian yang berbeda atau tidak dalam varian residual dalam model regresi

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda berfungsi untuk memprediksi bagaimana pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini merupakan variabel independen yaitu Serapan Anggaran, Saldo Bendahara Daerah, Kemandirian Daerah, Penyerapan Dana Perimbangan. Sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini merupakan variabel dependen yaitu Saldo Kas Akhir (SKA). Adapun persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$SKA = \alpha + \beta_1 SA + \beta_2 SBD + \beta_3 KD + \beta_4 PDP + \epsilon$$

Keterangan:

SKA	: Saldo Kas Akhir Tahun
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi
SA	: Serapan Anggaran
SBD	: Saldo Bendahara Daerah
KD	: Kemandirian Daerah
PDP	: Penyerpan Dana Perimbangan
ε	: Faktor lain

3.5.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya regresi berganda. Koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R2 = Koefisien Korelasi

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel dalam penelitian.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.2.2 Uji t

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah hipotesis dalam suatu penelitian ditolak atau diterima. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah atau bersama-sama. Pengujian T menurut Berenson, Levine, dan Krehbiel dalam buku *Basic Business Statistic* (Berenson et al., 2012) adalah berikut.

$$T_{\text{stat}} = \frac{b_1 - b_2}{S_{b_1}}$$

3.5.2.3 Uji F

Pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi berganda yaitu Uji F untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan secara simultan juga didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data SPSS Statistik Parametrik. Pengujian

hipotesis dengan menggunakan Uji F atau biasa disebut dengan Analysis of Varian (ANOVA). Pengujian ANOVA atau Uji F dapat dilakukan dengan menggunakan yaitu dengan melihat tingkat signifikan atau dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pengujian F menurut Berenson, Levine, dan Krehbiel dalam buku *Basic Business Statistic* (Berenson et al., 2012) adalah berikut.

$$F_n = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R = Koefisien Korelasi Ganda

k = Jumlah Variabel Independen

n = Jumlah Anggota Sampel

(n - k - 1) = Derajat kebebasan

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Setelah pengumpulan data sudah dilakukan, yaitu data berupa laporan keuangan yang terdapat data Saldo Kas Akhir, Serapan Anggaran, Saldo Bendahara Daerah, Kemandirian Daerah, dan Penyerapan Dana Perimbangan dengan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang diperoleh dari website resmi provinsi dan BPKAD Provinsi untuk masing-masing pemerintah daerah Provinsi. Data yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Data

Jumlah Provinsi Se-Indonesia	37
Jumlah Provinsi yang tidak memenuhi kriteria	(23)
Jumlah Provinsi yang memenuhi kriteria	14
Rentang waktu pengamatan (tahun)	3
Jumlah sampel total penelitian	41

Provinsi di Indonesia berjumlah 37 provinsi pada tahun 2022. Sebelumnya pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, jumlah provinsi di Indonesia berjumlah 34 provinsi. Sesuai dengan tabel di atas, maka dari 37 provinsi, terdapat 14 provinsi yang memenuhi kriteria penelitian yaitu, laporan keuangan yang lengkap dan sudah diaudit. Laporan keuangan yang digunakan yaitu laporan keuangan dengan rentang waktu selama 3 tahun (2018-2020), sehingga diperoleh data sebanyak 41 data yang terdiri dari 14 provinsi yang menjadi sampel dan memenuhi kriteria penelitian. Kemudian daari 41 data akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari hipotesis penelitian ini, yaitu serapan anggaran (SA), saldo bendahara daerah (SBD), kemandirian daerah (KD), dan penyerapan dana perimbangan (PDP) terhadap saldo kas akhir tahun.

Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik dimana analisis ini bertujuan membuktikan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan dari pembuktian hasil statistik. Teknik analisis statistik ini berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastis. Kemudian dilakukan juga analisis regresi berganda dengan pengujian keofisien determinasi, uji t, dan uji f.

4.1 Analisis Statistik

4.1.1 Uji normalitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized

		Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1438.05505037
Most Extreme Differences	Absolute	.164
	Positive	.164
	Negative	-.109
Test Statistic		.164
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dilihat dari tabel 4.2, hasil uji normalitas ditunjukkan dengan nilai 0.61 pada *Asym. Sig. (2-tailed)* yang dapat diartikan bahwa hasil uji normalitas memiliki nilai signifikansi > 0.05 . Sehingga dapat dikatakan bahwa pendistribusian nilai residul data yang akan diolah adalah normal dan dapat memenuhi syarat uji asumsi klasik. Selanjutnya, data dapat diolah dalam proses pengolahan data.

4.1.2 Uji multikolinearitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	(Constant)	
	SA (X1)	.964 1.037
	SBD (X2)	.934 1.071
	KD (X3)	.836 1.196
	PDP (X4)	.828 1.207

a. Variabel Dependen: Saldo Kas Akhir

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.2 di atas, nilai yang tertera pada kolom *Tolerance* menunjukkan nilai $> 0,1$ dengan nilai VIF untuk semua variabel independen bernilai < 10 , dengan ini maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

Dalam tabel hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa variabel SA memiliki nilai *Tolerance* sebesar $0,964 > 0,1$ dengan nilai VIF yang di dapat $1,037 < 10$. Dari hasil-hasil tersebut, maka variabel SA dapat dinyatakan memenuhi syarat uji multikolinearitas. Dengan demikian variabel SA tidak berpotensi untuk terjadi multikolinearitas

Kemudian pada tabel 4.2 juga kita dapat melihat bahwa variabel SBD menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar $0,934 > 0,1$ dengan nilai VIF sebesar $1,071 <$

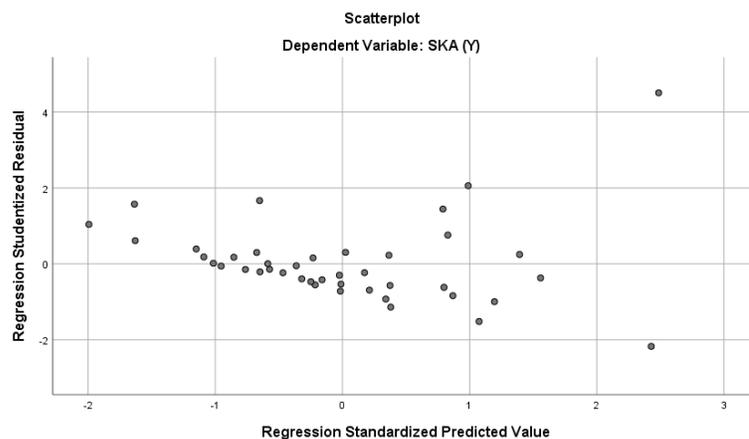
10. Oleh karena itu dari hasil tersebut variabel SBD memenuhi syarat uji multikolinearitas. Hal ini dikarenakan nilai *Tolerance* $>0,1$ dan *VIF* < 10 .

Variabel ketiga dalam uji multikolinearitas ini adalah variabel Kemandirian Daerah (KD). Pada tabel 4.2 terdapat hasil uji variabel KD dengan nilai *Tolerance* sebesar $0,836 > 0,1$ dengan nilai *VIF* sebesar $1,196 < 10$. Dengan demikian bahwa variabel KD dapat dikatakan memenuhi syarat uji multikolinearitas.

Variabel PDP merupakan variabel keempat dalam penelitian ini dan dilakukan uji multikolinearitas untuk menguji hubungan linear variabel PDP dengan variabel independen lainnya. Dilihat dari tabel 4.2, variabel PDP dengan nilai *Tolerance* $0,828 < 0,1$ dengan nilai *VIF* sebesar $1,207 < 10$. Dengan hasil tersebut bahwa variabel PDP dapat dikatakan memenuhi syarat uji multikolinearitas.

4.1.3 Uji heteroskedastis

Gambar 4.1
Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastis



Dilihat dari gambar 4.1 di atas, *Scatterplot* menunjukkan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y atau di atas dan di bawah angka 0, kemudian titik-titik menyebar tidak membuat pola tertentu. Sehingga dengan penyebaran titik-titik seperti gambar di atas dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak ada terjadinya heterokdastisitas.

4.2 Analisis Linear Berganda

Analisis regresi berganda berfungsi untuk memprediksi bagaimana pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variable untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara variable bebas (X) dengan variable terikat (Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini merupakan variable independent yaitu Serapan Anggaran (SA), Saldo Bendahara Daerah (SBD), Kemandirian Daerah (KD), dan Penyerapan Dana Perimbangan (PDP). Sedangkan variable terikat (Y) dalam penelitian ini merupakan variable dependen yaitu Saldo Kas Akhir (SKA). Berikut persamaan analisis linier berganda.

$$\mathbf{SKA = \alpha + \beta_1SA + \beta_2SBD + \beta_3KD + \beta_4PDP + \epsilon}$$

Tabel 4.4
Analisis Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	
1	(Constant)		17671.108
	SA (X1)		-18096.645
	SBD (X2)		-1610.610
	KD (X3)		3190.615
	PDP (X4)		-1625.422

Berdasarkan tabel 4.4 yang menunjukkan analisis linear berganda maka model persamaan regresi yang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$SKA = 17.671,108 - 18.096,645SA - 1.610,610SBD + 3.190,615KD - 1.625,422PDP + \epsilon$$

Dari persamaan di atas, konstanta bernilai positif 17.671,108 dapat diartikan bahwa adanya pengaruh searah antara variabel dependen dan variabel independen, jika SA, SBD, KD, dan PDP bernilai 0, maka besaran Saldo Kas Akhir di Provinsi Indonesia sebesar 17.671,10.

Nilai koefisien regresi pada tabel 4.4 untuk Serapan Anggaran (SA) adalah negatif dengan nilai -18.096,645. Nilai negative tersebut dapat diartikan bahwa terjadi pengaruh yang berlawanan antara variabel SA dengan SKA. Oleh

karena itu, dapat diartikan bahwa jika nilai SA ditingkatkan 1%, maka Saldo Kas Akhir akan menurun sebesar 18.096,645.

Variabel independen yang kedua pada tabel 4.4 adalah Saldo Bendahara Daerah (SBD) dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.610,610. Sama dengan variabel SA, nilai negative pada variabel SBD ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang berlawanan antara variabel SBD sebagai variabel independen dan variabel SKA sebagai variabel dependen. Sehingga dapat diartikan bahwa jika nilai SA ditingkatkan 1%, maka Saldo Kas Akhir akan menurun sebesar 1.610,610.

Nilai koefisien regresi untuk Kemandirian Daerah (KD) sebagai variabel independen ketiga adalah positif dengan nilai 3.190,615. Berbeda dengan variabel SA dan SBD, variabel KD bernilai positif yang artinya pengaruh variabel KD sebagai variabel independen dengan variabel SKA sebagai variabel dependen adalah searah dan tidak berlawanan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa jika nilai SA ditingkatkan 1%, maka Saldo Kas Akhir akan meningkat sebesar 3.190,615.

Variabel independen yang terakhir yang terdapat pada tabel 4.4 adalah Penyerpan Dana Perimbangan (PDP) dengan nilai -1.625,422. Variabel PDP bernilai negatif yang berarti variabel ini memiliki pengaruh berlawanan dengan variabel dependen SKA. Jika nilai SA ditingkatkan 1%, maka Saldo Kas Akhir akan menurun sebesar 1.625,422.

1.2.1 Uji Koefisien Determinan

Tabel 4.5
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 ^a	.350	.280	1513.793

a. Predictors: (Constant), PDP (X4) , SA (X1) , SBD (X2) , KD (X3)

b. Dependent Variable: SKA (Y)

Pada tabel 4.5, nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,280 atau 28%. Nilai ini dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen SA, SBD, KD, dan PDP secara bersama-sama dalam mempengaruhi dan menjelaskan variabel dependen SKA sebesar 28%. Sisanya 72% dipengaruhi variabel independen lainnya di luar penelitian ini.

1.2.2 Uji f

Tabel 4.6
Hasil Uji f

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45630710.313	4	11407677.578	4.978	.003 ^b
	Residual	84792605.306	37	2291692.035		
	Total	130423315.619	41			

- a. Dependent Variable: SKA (Y)
- b. Predictors: (Constant), PDP(4) , SA(X1) , SBD(X2) , KD(X3)

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas yang merupakan hasil uji f maka jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen SA, SBD, KD, dan PDP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen SKA.

Dari tabel 4.6 dapat dianalisis data dengan nilai f sebesar 4,978 dengan signifikansi sebesar $0,003 < 0,5$. Dari hasil tersebut dapat diartikan variabel independen SA, SBD, KD, dan PDP memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen SKA. Dengan demikian model regresi berganda dalam penelitian ini layak digunakan.

1.2.3 Uji t

Tabel 4.7
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	17671.108	5125.924		3.447	.001
	SA (X1)	-18096.645	5088.829	-.480	-3.556	.001
	SBD (X2)	-1610.610	4754.950	-.046	-.339	.737
	KD (X3)	3190.615	1420.523	.326	2.246	.031

PDP (X4)	-1625.422	2338.803	-.101	-.695	.491
----------	-----------	----------	-------	-------	------

Dilihat dari tabel 4.7 hasil uji t, yaitu pengujian hipotesis dimana jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen SA, SBD, KD, PDP berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen SKA. Hasil yang diperoleh dari tabel 4.7 adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Serapan Anggaran (SA) dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel SA berpengaruh signifikan terhadap Saldo Kas Akhir, sehingga H1: Serapan anggaran berpengaruh negatif terhadap saldo kas akhir tahun (Diterima)
- b. Variabel Saldo Bendahara Daerah (SBD) dengan nilai signifikansi sebesar $0,737 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel SDB tidak berpengaruh signifikan terhadap Saldo Kas Akhir, sehingga H2: Bendahara pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap saldo kas akhir tahun (Ditolak)
- c. Variabel Kemandirian Daerah (KD) dengan nilai signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel KD berpengaruh signifikan terhadap Saldo Kas Akhir, sehingga H3: Kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap saldo kas akhir tahun (Diterima)
- d. Variabel Penyerapan Dana Perimbangan (PDP) dengan nilai signifikansi sebesar $0,491 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel SA berpengaruh signifikan terhadap Saldo Kas Akhir, sehingga H4:

Penyerapan dana perimbangan daerah berpengaruh negatif terhadap saldo kas akhir tahun (Ditolak)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Serapan Anggaran Terhadap Sald Kas Akhir Tahun

Hasil pengujian hipotesis pertama, dibuktikan bahwa variabel independen SA berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Saldo Akhir Kas Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia. Dengan demikian dapat diartikan dengan semakin tingginya serapan anggaran suatu daerah provinsi, maka akan menurunkan Sado Akhir Kas pada satu periode yang sama, sehingga hasil pengujian hipotesis pertama tidak menolak hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “serapan anggaran berpengaruh negatif terhadap saldo kas akhir tahun.”

Hasil ini sesuai dengan prediksi dalam teori dan hipotesis yang menyatakan bahwa serapan anggaran menunjukkan anggaran belanja yang dapat direalisasi dalam satu periode tahun anggaran, besaran serapan anggaran berbanding terbalik dengan saldo kas (Abdullah & Muthia, 2017). Jika suatu anggaran diserap berarti ada anggaran belanja yang telah direalisasi sehingga akan ada kas yang dikeluarkan dalam realisasi belanja tersebut. Belanja sendiri merupakan salah satu contoh bentuk penggunaan kas dalam anggaran berbasis kas Hal ini dikarenakan belanja yang

dilakukan pemerintah akan menunjukkan bahwa pembangunan dan pelayanan yang dilakukan telah optimal sesuai dengan yang dianggarkan (Ruhmaini et al., 2019). Sehingga serapan anggaran belanja menunjukkan adanya penggunaan kas yang berkurang. Serapan anggaran sendiri terdiri dari alokasi murni taun anggaran berjalan serta sisa pekerjaan yang telah dialokasikan pada periode sebelumnya.

Semakin tinggi serapan anggaran maka semakin tinggi kemungkinan tercapainya keluaran (output) dan hasil (outcome) dari pelayanan publik sehingga semakin banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Idle cash yang besar memiliki risiko berupa kehilangan atau masalah keagenan, sehingga seharusnya saldo kas pada akhir tahun tidak besar. Serapan anggaran yang rendah dapat timbul dari adanya penyesuaian anggaran yang memperburuk kinerja (varian anggaran belanja semakin besar) sehingga masalah keagenan pun akan timbul (Abdullah & Muthia, 2017). Hal ini pun didukung oleh pernyataan maka semakin besar serapan anggaran serta menunjukan bagaimana kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan (Ruhmaini et al., 2019). Walaupun pada kenyataannya pencairan anggaran cenderung rendah sehingga memiliki risiko adanya penumpukan pada akhir tahun dan mencerminkan pengelolaan keuangan pemerintah yang kurang baik (Zakiati, 2016)

4.3.2 Pengaruh Saldo Bendahara Daerah Terhadap Sald Kas Akhir Tahun

Hasil pengujian hipotesis kedua, dibuktikan bahwa variabel independen SBD tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Saldo Akhir Kas Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia. Hasil tersebut dapat diartikan dengan semakin tingginya saldo bendahara pengeluaran suatu daerah provinsi, maka semakin tinggi juga Saldo Akhir Kas pada satu periode yang sama, sehingga hasil pengujian hipotesis kedua menolak hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “bendahara pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap saldo kas akhir tahun”

Bendahara daerah sebagai pengelola dan bertanggungjawab atas keluar dan masuknya kas dalam saldo rekening yang dikelola memiliki peran penting dalam mengatur jumlah saldo kas akhir tahun. Dalam penelitian Ambarwati (2020) telah menyatakan tidak akuratnya informasi terkait jumlah kas yang dikuasai bendahara pengeluaran sehingga sering terjadi adanya kesalahan pengambilan kebijakan saldo kas dan menjadikan adanya potensi saldo menganggur pada pengelolaan kas di bendahara pengeluaran, hal ini didukung oleh (Ambarwati, 2020).

Semakin tinggi kemampuan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan kas daerah, maka kas untuk anggaran pengeluaran juga akan optimal, sehingga kas yang menganggur akan cenderung lebih rendah. Namun, menyatakan analisis dari hasil uji hipotesis bahwa kemampuan ini tidak tercermin dalam Saldo Bendahara Daerah, sehingga banyaknya Saldo Bendahara Daerah mempengaruhi saldo kas akhir tahun dengan signifikan

dan berpengaruh positif. Pengaruh ini dapat diartikan jika Saldo Bendahara Daerah, Bendahara Pengeluaran tinggi, maka Saldo Kas Akhir Tahun pun akan tinggi. Tingginya Saldo Bendahara Pengeluaran ini menunjukkan adanya saldo kas yang menimbun sehingga menambah jumlah saldo kas akhir tahun. Adanya kas yang tertimbun pada saldo bendahara pengeluaran, maka menunjukkan pengeluaran pemerintah provinsi pada periode tersebut tidak tinggi. Aktivitas ini menunjukkan bahwa kurangnya belanja yang dilakukan pemerintah daerah provinsi. Sehingga, dapat diartikan bahwa anggaran belanja yang kurang maksimal direalisasikan. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah dapat dinilai kurang baik dan akan menimbulkan masalah keagenan.

Hasil uji hipotesis kedua ditolak sehingga menunjukkan bahwa semakin tinggi saldo bendahara pengeluaran maka akan menyebabkan semakin tingginya saldo akhir kas dan hal tersebut menunjukkan kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja daerah dengan menggunakan saldo bendahara pengeluaran.

4.3.3 Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Saldo Kas Akhir Tahun

Hasil pengujian hipotesis ketiga, dibuktikan bahwa variabel independen KD berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Saldo Akhir Kas Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia. Sehingga semakin

tingginya kemandirian daerah suatu daerah provinsi, maka semakin tinggi juga Sado Akhir Kas pada satu periode yang sama, sehingga hasil pengujian hipotesis kedua menerima hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap saldo kas akhir tahun.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan porsi PAD dalam pendapatan yang besar menunjukkan tingkat kemandirian daerah suatu provinsi dengan sumber-sumber PAD yang berkontribusi dalam meningkatkan PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD. Semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah, artinya tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah (Saputra & Fernando, 2017).

Dalam penelitian (Akbar et al., 2016) menunjukkan bagaimana peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam besarnya saldo PAD dengan pengelolaan kas pemerintah daerah sehingga jumlah pendapatan yang dimiliki suatu daerah akan meningkat. Sumber-sumber PAD lainnya pun masuk ke dalam pendapatan operasional, dimana pendapatan ini secara langsung akan masuk ke dalam Saldo kas pemerintah daerah. Sehingga semakin tinggi operasional suatu daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah, maka saldo kas akhir akan semakin tinggi sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima

4.3.4 Pengaruh Penyerapan Dana Perimbangan Terhadap Sald Kas Akhir Tahun

Hasil pengujian hipotesis keempat, dibuktikan bahwa variabel independen PDP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Saldo Akhir Kas Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia. Oleh karena itu, semakin tingginya penyerapan dana perimbangan suatu daerah provinsi, maka semakin tinggi juga Sado Akhir Kas pada satu periode yang sama, sehingga hasil pengujian hipotesis kedua menerima hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “Penyerapan dana perimbangan daerah berpengaruh negatif terhadap saldo kas akhir tahun “

Sesuai dengan pengertian dana perimbangan dapat merupakan sejumlah uang melalui APBN yang diterima oleh pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat sebagai pendanaan daerah dalam membiayai kegiatan ekonomi (Saleh, 2020). Sehingga seharusnya ketika dana perimbangan tersebut diserap sesuai dengan anggaran atau melebihi anggaran, maka kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah provinsi akan meningkat karena biaya dari penyerapan dana perimbangan yang meningkat. Peristiwa ini akan menyebabkan saldo yang tersisa dalam dana perimbangan yang telah dikirim pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan berkurang dan menyebabkan menurunnya saldo kas pada akhir periode.

Hasil pengujian hipotesis keempat ditolak, yang artinya semakin tinggi penyerapan dana perimbangan maka semakin tinggi juga saldo kas akhir tahun. Namun, pernyataan ini tidak sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya mengenai tingkat penyerapan dana perimbangan. Hal ini dikarenakan penyerapan dana perimbangan yang dilakukan pemerintah daerah provinsi tidak sesuai dengan kecepatan siklus penerimaan dana perimbangan itu sendiri. Ketika penyerapan dana perimbangan yang semakin tinggi namun saldo dana perimbangan sebelumnya masih ada penumpukan, maka saldo kas akhir pun tidak akan berpengaruh signifikan. Yang artinya akan ada sisa dana perimbangan tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang akan terus bertambah meski penyerapan dana perimbangan sudah meningkat dari periode sebelumnya. Peristiwa ini didukung oleh penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dana transfer pemerintah pusat terus meningkat setiap tahun meskipun penyerapan dana tersebut oleh pemerintah daerah pun semakin meningkat (Inayari & Setiawan, 2017).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini mengenai Determinasi Saldo Kas Akhir Tahun Daerah Provinsi di Indonesia, yaitu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Saldo Kas Akhir yaitu Serapan Anggaran, Saldo Bendahara Daerah, Kemandirian Daerah, dan Penyerpan Dana Perimbangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data dalam laporan keuangan dengan rentan waktu 2018-2020 yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi di Indonesia dan telah diaudit. Kemudian data ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS)* Versi 26. Banyak data yang digunakan sebanyak 41 data dari 14 daerah provinsi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Saldo Akhir Kas Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia. Yang dapat diartikan dengan semakin tingginya serapan anggaran suatu daerah provinsi, maka akan menurunkan Sado Akhir Kas pada satu periode yang sama.
2. Saldo Bendahara Daerah tidak berpengaruh signifikan Saldo Akhir Kas Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia. Yang dapat diartikan dengan semakin tingginya saldo bendahara pengeluaran suatu daerah

provinsi, maka semakin tinggi juga Sado Akhir Kas pada satu periode yang sama.

3. Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Saldo Akhir Kas Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia. Yang dapat diartikan dengan semakin tingginya kemandirian daerah suatu daerah provinsi, maka semakin tinggi juga Sado Akhir Kas pada satu periode yang sama.
4. Penyerapan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Saldo Akhir Kas Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia. Yang dapat diartikan dengan semakin tingginya penyerapan dana perimbangan suatu daerah provinsi, maka semakin tinggi juga Sado Akhir Kas pada satu periode yang sama.

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian ini serta analisis yang dihasilkan menjadi informasi yang dapat dijadikan saran terkait dengan permasalahan yang muncul. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Provinsi di Indonesia, saldo kas akhir tahun dapat di atur oleh beberapa faktor seperti SA, SDB, KD, dan PDP agar saldo kas akhir tidak terjadi penumpukan ataupun kekurangan untuk menjadi saldo kas awal periode berikutnya. Saldo kas akhir tahun dikontrol dengan

tujuan untuk kinerja pemerintah daerah provinsi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan kas merupakan asset lancar yang mudah untuk dicairkan dan arus kas yang masuk dan keluar lebih lancar dibandingkan asset lainnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah keagenan dalam hal ini maka pemerintah daerah provinsi dapat mengatur SA, SBD, KD, dan PDP untuk kinerja pemerintah yang lebih baik. Selain itu, dalam penelitian ini pemerolehan data yang memiliki kendali dengan masih banyaknya pemerintah daerah yang kurang transparansi terhadap ketersediaan laporan keuangan yang telah di audit untuk publik. Sehingga, informasi mengenai keuangan kurang tersampaikan ke masyarakat

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memiliki variabel independen lebih baru dan bervariasi untuk menambah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Saldo Kas Akhir tahun. Variabel independen yang dapat ditambahkan dapat berupa sistem informasi dan teknologi yang digunakan pemerintah daerah provinsi dalam pencatatan keuangan berbasis kas, serta beberapa variabel seperti keperilakuan/ *behavior* sumber daya manusia pemerintah daerah.

5.3 KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa tidak adanya variabel selain variabel yang bersifat ekonomis. Sehingga dibutuhkan variabel berupa

keprilakuan pegawai pemerintah daerah, *behavior* pemerintah daerah itu sendiri, ataupun pandangan masyarakat terhadap pengelolaan kas daerah oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan terhadap data berupa laporan keuangan pemerintah provinsi tahun 2018-2020 yang tidak memenuhi kriteria seperti transparansi (tersedia dalam website resmi), telah diaudit oleh BPK, lengkap, serta jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Muthia, N. (2017). Determinan saldo kas akhir tahun pada pemerintah daerah di Aceh. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(1), 1410–2420.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art5>
- Agus, P., & Madya, W. (2015). *Memahami Akuntansi Kas pada Pemerintah Daerah: Akuntansi Kas pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)*. Balai Diklat Keuangan Cimahi.
- Akbar, S., Efendi, R., & Akmam, Z. (2016). Efektivitas Pengelolaan Kas Daerah Dalam PAD. *JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Administrasi Bisnis)*, 1(2), 18–28. <https://doi.org/10.31227/osf.io/b4285>
- Ambarwati, R. D. (2020). Optimalisasi Pelaporan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II dengan Pendekatan Soft System. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(1), 1–23.
<https://doi.org/10.35448/jrat.v13i1.8038>
- Berenson, M. L., Levine, D. M., & Krehbiel, T. C. (2012). Basic Business Statistick 12th Edition. In S. Yagan & E. Svendsen (Eds.), *Health (San Francisco)* (11th ed.). Pearson Education, Inc. publising as Prentice Hall.
<https://id.id1lib.org/book/2294909/867632?dsorce=recommend>
- Ginting, A. M., & Hamzah, M. Z. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 105–127.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.126>
- Harjowiryo, M. (2020). Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam

- Menyetorkan Penerimaan Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 285–310.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.315>
- Inayari, N. I., & Setiawan, D. (2017). Tampilan FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN_KOTA DI INDONESIA.pdf. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.2062>
- Indra, R. (2017). Analisis Saldo Kas Optimal Badan Layanan Umum: Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 15–26.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v2i4.37>
- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE Michael. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360.
<https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Nusa, N. D., & Muslihah, S. (2021). Pengaruh Serapan Anggaran, Kepemimpinan Etis, Tindak Lanjut Temuan Bpk, Dan Keefektifan Audit Internal Pada Hasil Audit Lkpd. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan ...*, 10(2), 201–213.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v10i2.35936>
- Orocomna, M., Bharanti, B. E., & Layuk, P. K. A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(3), 1–17.

<https://doi.org/https://doi.org/10.52062/keuda.v2i3.725>

- Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. (2019). Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 31–43. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10912>
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. In *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* (Vol. 15, Issue 2, pp. 111–134). <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber Pad Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515–1534. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9215>
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review*, 1(1), 67–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56>
- Zakiati, M. (2016). Analisis Serapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Pemerintah Kota Sabang. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dengan*, 5(4), 67–76. <https://doi.org/http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/5732>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Saldo Kas Akhir Pemerintah Daerah Provinsi Periode 2018 - 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

Provinsi	Saldo Kas Akhir		
	2018	2019	2020
Aceh	3,054	2,846	3,969
Bali	703	831	192
Bangka Belitung	303	221	50
Banten	1,080	957	681
Jakarta	9,756	1,204	5,181
Jawa Tengah	1,615	1,128	864
Kalimantan Timur	1,862	2,250	2,958
Kalimantan Utara	187	353	97
Lampung	97	336	182
NTB	95	147	121
Riau	68	111	531
Sumatera Barat	501	328	260
Sumatera Selatan	686	349	124
Sumatera Utara	981	336	499

Lampiran 2
Data Rasio Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi
Periode 2018 – 2020

Provinsi	Serapan Anggaran		
	2018	2019	2020
Aceh	0.80690	0.88990	0.81150
Bali	0.90950	0.87980	0.93620
Bangka Belitung	0.90880	0.89730	0.93190
Banten	0.88910	0.87010	0.92420
Jakarta	0.81710	0.83230	0.88280
Jawa Tengah	0.92380	0.93860	0.95960
Kalimantan Timur	0.88970	0.83280	0.82220
Kalimantan Utara	0.80340	0.86830	0.92590
Lampung	0.83527	0.97784	0.95857
NTB	0.89830	0.92890	0.93160
Riau	0.90120	0.97260	0.92680
Sumatera Barat	0.95640	0.92420	0.95220
Sumatera Selatan	0.91520	0.90780	0.87330
Sumatera Utara	0.89450	0.89370	0.95130

Lampiran 3
Data Rasio Saldo Bendahara Daerah-Pengeluaran
Periode 2018 – 2020

Provinsi	Saldo Bendahara Daerah- Pengeluaran		
	2018	2019	2020
Aceh	0.000167	0.009098	0.000107
Bali	0.000349	0.000007	0,000001
Bangka Belitung	0.000211	0.000723	0.001327
Banten	0.001544	0.004911	0.002053
Jakarta	0.010815	0.085758	0.020226
Jawa Tengah	0.000382	0.000134	0.000021
Kalimantan Timur	0.000156	0.000149	0.000017
Kalimantan Utara	0.020984	0.029765	0.006951
Lampung	0.000043	0.000001	0.000001
NTB	0.000061	0.001583	0.000407
Riau	0.070090	0.320843	0.012629
Sumatera Barat	0.000066	0.002541	0.000033
Sumatera Selatan	0.000003	0.000030	0.000614
Sumatera Utara	0.000041	0.000430	0.002216

Lampiran 4
Data Rasio Kemandirian Daerah
Periode 2018 – 2020

Provinsi	Kemandirian Daerah		
	2018	2019	2020
Aceh	0.16353	0.17133	0.17803
Bali	0.59407	0.60539	0.53678
Bangka Belitung	0.33260	0.30684	0.28414
Banten	0.61327	0.62689	0.57156
Jakarta	0.70755	0.73366	0.66947
Jawa Tengah	0.55508	0.55832	0.53825
Kalimantan Timur	0.54363	0.55676	0.52197
Kalimantan Utara	0.23716	0.25128	0.22897
Lampung	0.01451	0.01684	0.01550
NTB	0.33603	0.34774	0.35091
Riau	0.42918	0.40884	0.38655
Sumatera Barat	0.36157	0.36437	0.35434
Sumatera Selatan	0.38594	0.37653	0.36375
Sumatera Utara	0.44391	0.44048	0.42824

Lampiran 5
Data Rasio Penyerapan Dana Perimbangan
Periode 2018 – 2020

Provinsi	2018	2019	2020
Aceh	0.96670	1.00950	0.96870
Bali	0.96420	0.99650	0.95720
Bangka Belitung	1.00540	0.98650	0.96770
Banten	0.95260	0.92980	1.01310
Jakarta	0.83430	0.68020	0.99090
Jawa Tengah	0.95560	0.96330	0.97780
Kalimantan Timur	1.09150	0.97670	1.13390
Kalimantan Utara	0.96980	0.97150	0.95990
Lampung	0.64981	0.60754	0.58319
NTB	0.96500	0.92750	0.97900
Riau	0.91740	0.88500	0.97590
Sumatera Barat	0.97520	0.96230	0.96890
Sumatera Selatan	0.97120	0.90340	0.93650
Sumatera Utara	0.96700	0.94370	0.96870